

PERAN KONSUL JENDERAL MESIR DI INDIA TAHUN 1947 BAGI STATUS INTERNASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abstract

In 1947 Arab League had entrusted Mohammad Abdul Mun'im, an Egypt diplomat accredited in India, with a duty to deliver the recognition of the League to the Republic of Indonesia (RI). He had broken through the blockade of the Netherlands. His success of delivering the League's message had had a decisive implication to the international status of RI. Following his visit, RI as soon as possible sent its diplomats to the Middle East. Furthermore, the States of the members of the League recognized the RI. In the sessions of the United Nations Security Council (SC) which discussed Indonesian questions, the Arab States which was a member of the SC carried the interest of the RI on their back. This support had a great influence on the international status of the RI in the revolution decade.

Key words: *Mohammad Abdul Mun'im, international status of the Republic of Indonesia.*

PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, bangsa-bangsa dan negara-negara saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Berdirinya Republik Indonesia (RI), tidak dapat dilepaskan dari peran orang, kelompok orang, bangsa, dan organisasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengakuan negara-negara anggota Liga Arab terhadap eksistensi RI tidak dapat begitu saja dilupakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 menerima suatu resolusi yang berisikan pengakuan *de jure* atas RI.

Mengingat pada waktu itu jalur transportasi lintas negara dikuasai oleh Inggris dan Belanda, kedua negara ini melalui perwakilan diplomatik dan konsulernya sangat hati-hati dalam memberikan visa bagi perjalanan diplomatik. Oleh karena itu, untuk menyampaikan sikap Liga Arab tersebut penuh

hambatan dan risiko. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan seorang utusan yang berani menerobos blokade Inggris dan Belanda. Akhirnya, Liga Arab mengutus Mohammad Abdul Mun'im, seorang Konsul Jenderal Mesir di India. Dengan begitu, Mun'im merupakan utusan khusus Liga Arab untuk menyampaikan pengakuan organisasi internasional regional tersebut terhadap RI.

Karya tulis ini memfokuskan pada diskusi peran Mun'im, karena implikasi dari peran yang bersangkutan sangatlah luas. Sebagai contoh, sikap Liga Arab secara kelembagaan, akhirnya diikuti oleh negara-negara anggotanya untuk memberikan pengakuan terhadap RI. Pengakuan yang satu diikuti pengakuan dari lainnya ini membuat semakin meluasnya pengakuan terhadap RI, sehingga mempunyai implikasi terhadap penguatan status internasional RI pada awal kemerdekaan itu. Untuk itu, karya ilmiah ini hendak mendiskusikan permasalahan: peranan diplomatik yang bagaimanakah yang dimainkan oleh Mohammad Abdul Mun'im, seorang Konsul Jenderal Mesir di India, bagi penguatan status internasional RI?

PENGAKUAN DE FACTO TERHADAP KOMUNITAS WARGA INDONESIA DI TIMUR TENGAH

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Liga Arab telah berdiri dan bermarkas di Kairo dengan Sekretaris Jenderalnya Abdul Rahman Azzam Passya yang dikenal sebagai musuh Inggris. Kenyataan ini menguntungkan perjuangan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dalam melakukan pendekatan dengan negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga tersebut. Sementara itu, di Kairo, Mekkah, dan Baghdad telah berdiri Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di Mesir sendiri berdiri pula satu panitia khusus yang diberi nama Panitia Pembela Indonesia yang didukung oleh pemimpin-pemimpin Mesir dan Arab yang berada di Kairo. Para pemimpin itu misalnya Jenderal Saleh Harb Passya dan Abdul Rahman Azzam Passya. Keduanya pernah sama-sama dipenjarakan oleh Inggris.

Pada bulan Oktober 1945 PPKI dari Kairo, Mekkah, dan Baghdad menyelenggarakan konferensi kerja di Mekkah. Konferensi ini menerima rancangan yang dibuat Panitia Kairo. Rancangan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Memfokuskan perjuangan menentang campur tangan militer Inggris di Indonesia dan Belanda di Indonesia; (2) Membebaskan warga Indonesia di luar negeri dari kewarganegaraan Belanda. Apabila warga negara Indonesia di luar negeri telah dapat secara *de facto* membebaskan diri kewarganegaraan Belanda. Menjadikan Kairo sebagai pusat PPKI di Timur Tengah, sehubungan dengan

Kairo yang merupakan Markas Besar Liga Arab. Salah satu hasil dari perjuangan tersebut adalah diakuinya kewarganegaraan RI oleh pemerintah-pemerintah setempat di Timur Tengah. Hal ini berarti bahwa pemerintah setempat mengakui *de facto* kemerdekaan RI.

Akibatnya, Kedutaan Belanda di Mesir menuntut supaya warga Indonesia di Mesir menandatangani pangakuan bahwa pemerintah yang sah di Indonesia adalah Pemerintah Hindia Belanda, dan kemudian menuntut pula supaya memperbaharui paspor mereka. Tuntutan Kedutaan Belanda tersebut ditolak oleh komunitas Indonesia di Timur Tengah. Penolakan tersebut diwujudkan dengan membakar paspor-paspor mereka yang dikeluarkan oleh Belanda.

Sementara itu, sikap Pemerintah Mesir sendiri menguntungkan komunitas Indonesia. Mesir menganggap warga Indonesia di Mesir tidak ada lagi hubungan dengan Kedutaan Belanda. Segala hal yang menyangkut mereka, Pemerintah Mesir hanya berhubungan dengan PPKI. Semenjak tanggal 23 Maret 1946 Mesir telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto*. Keputusan Mesir ini diikuti oleh Pemerintah-pemerintah Arab lainnya. PPKI di Timur Tengah dianggap sebagai Perwakilan Sementara RI. Tiga puluh ton beras yang dikirim ke Arab Saudi untuk warga RI di sana, yang tadinya diberikan melalui Kedutaan Belanda, dialihkan kepada PPKI di Kairo. Pengiriman beras ke Arab Saudi tersebut tetap bebas dari bea cukai, sebagai perlakuan yang sebelumnya diperoleh Kedutaan Belanda. Demikian pula dalam melakukan perjalanan, warga RI cukup membawa "Surat Keterangan" yang ditandatangani oleh Ketua Panitia setempat, termasuk mereka yang pulang ke Indonesia sebelum pengakuan *de jure* oleh Mesir dan Negara-Negara Arab lainnya.

Selanjutnya, ketika perutusan diplomatik RI pertama yang dikirim ke den Haag dipimpin oleh Mr. Suwandi singgah di Kairo, mereka bertemu dengan Menlu Luthfi Sayed dan Raja Farouk menyampaikan harapan-harapan beliau terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Pada ulang tahun pertama Proklamasi tahun 1946, Radio Kairo ikut merayakannya dengan kata pengantar yang simpatik. Radio ini menyiarkan lagu-lagu Indonesia. Untuk pertama kalinya lagu "Indonesia Raya" dalam Bahasa Indonesia dan Arab disiarkan sebagai pembuka dan penutup acara radio tersebut. Selain itu juga disiarkan sandiwara radio dengan judul Kemerdekaan Indonesia.

LIGA ARAB MENGIRIM MOHAMMAD ABDUL MUN'IM KE INDONESIA

Pada tanggal 18 Nopember 1946 diselenggarakanlah Sidang Menteri-

Menteri Luar Negeri Liga Arab yang antara lain membahas pengakuan terhadap RI. Sidang ini langsung mengambil keputusan untuk mengamanatkan kepada negara-negara Arab anggotanya supaya mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh.¹ Menurut Sekretaris Jenderal Liga Arab, keputusan demikian telah mengandung pengakuan dari negara-negara anggotanya karena yang turut memutuskan adalah para menteri luar negeri dari negara-negara anggota Liga Arab. Selanjutnya dengan Surat No. 3128 tanggal 28 Nopember 1946 Sekjen Liga Arab menyampaikan keputusan itu kepada Pemerintah RI. Pada waktu yang sama keputusan ini disampaikan pula kepada Kedutaan Belanda di Kairo.²

Selanjutnya, Sekjen Liga Arab memutuskan mengirim satu delegasi ke Indonesia yang dipimpin oleh Sekjen itu sendiri. Namun, Inggris yang masih berkuasa tidak bersedia memberikan visa ke Yogyakarta. Dengan persetujuan Menlu Mesir, Sekjen Liga Arab menugaskan dengan sangat rahasia kepada Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, supaya pergi ke Indonesia dengan menyamar sebagai turis, untuk menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Pemerintah Indonesia dan dalam satu harapan baik Raja Faruk kepada Presiden Soekarno.

Mohammad Abdul Mun'im meninggalkan Bombay menuju Singapura, dengan harapan mendapatkan visa masuk Indonesia, tetapi Perwakilan Belanda di sana menolaknya memberi visa.³ Ia bertemu dengan Miss Ktut Tantri, wanita kulit putih yang membantu pejuang Indonesia di Jawa Timur dengan pidato-pidatonya di corong radio bersama Bung Tomo. Ktut Tantri berusaha keras membantu Mohammad Abdul Mun'im sehingga berhasil mencarter sebuah pesawat terbang yang membawa mereka menerobos blokade Belanda langsung menuju Yogyakarta.⁴ Beliau berhasil menembus blokade Sekutu.⁵ Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyiarkan pada petang Kamis 13 Maret 1947:

¹ Bandingkan: D. Sidik Suraputra, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 157.

² Muhammad Zein Hassan, "Hubungan Indonesia-Mesir dan Negara-Negara Liga Arab", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta, 1978, hal. 32.

³ A.R. Baswedan, "Catatan dan Kenangan", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta, 1978, hal. 51.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Zein Hassan, *op. cit.*, hal. 33.

“Telah sampai di Yogyakarta dengan pesawat khusus Tuan Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay dan Utusan Istimewa Liga Arab.”⁶

Abdul Mun'im menghadap Presiden Soekarno pada hari Sabtu 15 Maret 1947 untuk menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab. Beliau menyampaikan Keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 Nopember 1946 yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat.⁷ Dengan kejadian ini, dalam sejarah diplomatik RI dapat ditemukan dua peristiwa penting. *Pertama*, satu perutusan Mesir dengan menghadapi bahaya, menyampaikan pengakuan negaranya dan pengakuan Liga Arab kepada RI. *Kedua*, untuk pertama kalinya RI menyambut kedatangan perutusan negara asing sekaligus perutusan organisasi internasional.⁸

Selanjutnya beliau mendesak agar RI mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus ikut menghadiri *Inter Asian Conference* di New Delhi. Menanggapi hal tersebut, Sjahrir memutuskan untuk mengirim delegasi RI ke Mesir dan menerima undangan dari Nehru.

Meskipun keberangkatannya ke New Delhi berarti tertundanya beberapa pelaksanaan Persetujuan Linggarjati, tetapi pengiriman utusan diplomatik ke New Delhi itu akan memberi manfaat jauh lebih besar. Dapat diperkirakan bahwa betapa pentingnya kedudukan Pemerintah India kelak terhadap perjuangan RI. Selain itu, Konferensi di New Delhi ini akan memberi kesempatan pula untuk mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Birma, Thailand, Tiongkok, dll.⁹ Dari paparan tersebut dapatlah dikatakan bahwa kedatangan Konsul Jenderal Mesir sebagai utusan Liga Arab kepada Pemerintah RI telah membuka pintu yang lebar bagi diplomasi RI undak dapat secara intensif berhubungan dengan negara-negara lain.

KUNJUNGAN BALASAN RI TERHADAP LIGA ARAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL RI

Pada waktu Mohammad Abdul Mun'im hendak kembali ke Kairo, Haji Agus Salim, pimpinan delegasi RI, meminta kemurahan hati utusan Liga Arab itu supaya memperkenankan delegasi RI turut naik pesawatnya sampai

⁶ *Ibid.*

⁷ A.R. Baswedan, *op. cit.*, hal. 52.

⁸ Muhammad Zein Hassan, *op. cit.*, hal. 32-33.

⁹ A.R. Baswedan, *loc. cit.*

Singapura. Pada saat itu di Maguwo sudah hadir pula Mr. S. Muwalladi, Kepala Bagian Asia Tenggara di Departemen Luar Negeri (Deplu), yang telah bersedia memberikan “sertifikat pengganti paspor” (*certificat en lieu du passport*) kepada tiap-tiap anggota delegasi RI. Untuk mempercepat pekerjaannya Mr. Muwalladi mempersilakan masing-masing mengisi sendiri surat keterangan itu, sehingga ia sebagai pegawai Deplu tinggal menandatangani dan mengecap surat-surat itu. Jumlah anggota delegasi RI itu adalah 24 orang.¹⁰ Permohonan Haji Agus Salim tersebut dikabulkan oleh Mohammad Abdul Mun'im.

Dengan membawa Misi Diplomatik RI untuk negara-negara anggota Liga Arab yang dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim, pesawat tersebut pertama-tama sampai di Singapura. Di lapangan terbang kota itu delegasi RI disambut oleh masyarakat Indonesia dengan meriah dan antusias sekali. Mereka melambai-lambaikan bendera-bendera kecil merah putih ketika pesawat tiba di sana. Di Singapura inilah delegasi RI berpisah dengan Mohammad Abdul Mun'im. Delegasi RI selanjutnya mencharter pesawat terbang lain untuk meneruskan perjalanan ke New Delhi.¹¹

IMPLIKASI TERHADAP HUBUNGAN RI DAN NEGARA-NEGARA DI TIMUR TENGAH

Setelah mengadakan persiapan di Bombay, delegasi RI meneruskan perjalanan ke Mesir¹² dengan singgah terlebih dahulu di pelabuhan udara Lydda, Palestina.¹³ Dari sini delegasi RI melanjutkan perjalanan ke Mesir. Fasilitas penerbangan dari Palestina ke Mesir ini sudah dipersiapkan oleh para mahasiswa Indonesia karena Mohammad Abdul Mun'im sudah berkoordinasi dengan mereka sebelumnya.¹⁴ Setiba di Mesir delegasi RI diterima sebagai tamu Liga Arab selama empat bulan.¹⁵

¹⁰ Ali Sastroamidjojo, “Tentang Pesawat Terbang Khusus Utusan Mesir”, dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, 1978, *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta, hal. 83.

¹¹ *Ibid.*

¹² H.M. Rasyidi, “Negara-Negara Arab Adalah Yang Pertama Mengakui Kemerdekaan Bangsa Indonesia”, dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta, 1978, hal. 22.

¹³ M. Zein Hassan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (Perjuangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah)*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hal. 197.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 198.

Kegiatan pertama delegasi RI adalah mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa. Kepada para mahasiswa yang tergabung dalam PPKI itu, Haji Agus Salim mewakili Pemerintah RI mengatakan bahwa “kegiatan Panitia di Timur Tengah telah memungkinkan RI dengan resmi memasuki perjuangan diplomatik di forum internasional. Dukungan negara-negara Arab telah diperoleh para mahasiswa ini.”¹⁶ Dengan kata lain, kegiatan politik para mahasiswa di Timur Tengah telah melapangkan jalan formal perjuangan diplomatik Pemerintah RI.

Kegiatan kedua, delegasi RI memulai kunjungan-kunjungan kehormatan dengan mengunjungi Istana Abidin guna mencatatkan nama mereka dalam Daftar Penghormatan Kerajaan, sebagai penghormatan kepada Raja Farouk. Dengan pendaftaran ini bukan segi protokolernya yang dicari, meskipun wajib. Bagi perjuangan diplomatik RI, hal tersebut dilakukan sebagai penghargaan kepada Raja Farouk yang anti-Inggeris telah mendorong Pemerintah Mesir lebih tegas mendukung RI mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Dukungan ini juga diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Bahkan Pemerintah Mesir memberikan pengakuan *de facto* kepada PPKI sebagai “Perwakilan RI Sementara”, menanti Perwakilan RI resmi didirikan.¹⁷

Kegiatan ketiga, delegasi RI melakukan kunjungan resmi kepada Abdulrahman Azzam Pasya, Sekjen Liga Arab sebagai tuan rumah. Kepada delegasi RI, Pasya mengatakan bahwa para mahasiswa Indonesia telah berhasil menyampaikan kepentingan RI kepada negara-negara Arab.

Kegiatan keempat, delegasi RI melakukan kunjungan kehormatan kepada Mahmud Fahmi Nokrasyi Pasya, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Mesir di Kementerian Luar Negeri Mesir. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tujuan utama delegasi RI ke Timur Tengah adalah untuk mengadakan hubungan diplomatik antara RI dan negara-negara Arab.¹⁸ Setelah mengadakan perundingan dengan Pemerintah Mesir, pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatangani Perjanjian Persahabatan Hubungan Diplomatik dan Konsuler dan Perjanjian Perdagangan antara RI dan Kerajaan Mesir.

Sementara itu, situasi politik dalam negeri berkembang sedemikian rupa sehingga dibentuk kabinet baru pada tanggal 3 Juli 1947 oleh Amir Sjarifuddin

¹⁶ *Ibid.*, hal. 202.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 202-203.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 203-204.

sebagai Perdana Menteri dan Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri. Kemudian Haji Agus Salim melanjutkan tugasnya ke Suriah, Irak dan Lebanon. Beliau sampai di Damaskus (Suriah) pada tanggal 6 Juli 1947 dan di Bagdad pada tanggal 16 Juli.

Melalui Surat No. 155/L tanggal 7 Agustus 1947 Haji Agus Salim menyampaikan kepada Kerajaan Mesir keberlangsungan tugas Delegasi RI untuk negara-negara Arab sebagai berikut. Mohammad Rasyidi ditugaskan sebagai *Charge d'Affaires*, M. Nazir Pamoncak sebagai *Counsellor*, Mohammad Zein Hassan sebagai Sekretaris I, dan Mansur Abu Makarim sebagai Sekretaris II. Mereka menjadi staf Kedutaan RI pada tingkat *Charge d'affaires* di Kairo. Ini merupakan Kedutaan RI yang pertama dibuka di luar negeri semenjak Proklamasi.¹⁹ Staf ini juga merangkap sebagai Misi Diplomatik RI Tetap untuk negara-negara anggota Liga Arab.²⁰

Dalam hal pembukaan Perwakilan RI di luar negeri, terjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam perkembangan Perwakilan ini. Ketika Arab Saudi mengakui RI pada tanggal 21 November 1947, telah disepakati pula dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan. Komunitas Indonesia di sana mendesak supaya pembukaan Perwakilan RI dipercepat. Ketika Mohammad Rasyidi, Wakil RI bagi negara-negara Arab datang ke Arab Saudi bersama dengan Misi Haji RI Pertama pada tanggal 17 Oktober 1948 telah diadakan rapat segitiga antara Mohammad Rasyidi sebagai Wakil RI, Misi Haji RI, dan para pemimpin komunitas Indonesia di sana. Atas desakan para pemimpin masyarakat itu, telah disetujui pembukaan Perwakilan RI di Jeddah dengan Ismail Banda sebagai Kepala Perwakilan RI.²¹

IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN DIPLOMASI DI DK PBB

Dengan dibicarakannya masalah Indonesia di forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Lebih dari itu, yang terpenting adalah internasionalisasi masalah Indonesia melalui sidang-sidang di DK.

¹⁹ M. Zein Hassan, *op. cit.*, hal. 267-269.

²⁰ Mohammad Zein Hassan, *op. cit.*, hal. 33.

²¹ M. Zein Hassan, *op. cit.*, hal. 271-272.

Berkaitan dengan sidang-sidang di DK tersebut, pembicaraannya menyinggung Pasal 31 dan 32 Piagam PBB. Pasal 31 Piagam PBB berbunyi sebagai berikut. "Setiap Anggota PBB yang bukan anggota DK dapat turut serta, tanpa hak suara, dalam pembicaraan sesuatu masalah yang diajukan kepada DK apabila Dewan ini berpendapat bahwa masalah tersebut terutama menyangkut kepentingan Anggota itu." Pertikaian bersenjata antara RI dan Belanda diajukan oleh Australia kepada DK untuk dimintakan resolusi guna menghentikan pertikaian bersenjata tersebut. Untuk menerapkan ketentuan pasal ini sulit karena RI pada saat itu belum menjadi Anggota PBB.

Selanjutnya Pasal 32 Piagam PBB berbunyi: "Setiap Anggota PBB yang bukan Anggota DK atau sesuatu negara yang bukan Anggota PBB, apabila ia merupakan pihak dalam pertikaian yang sedang dalam pertimbangan DK, diundang untuk turut serta, tanpa hak suara dalam pembicaraan mengenai pertikaian itu." Mengingat dalam Pasal 32 ini terdapat klausula yang berbunyi "... atau sesuatu negara bukan Anggota PBB, ..." maka ketentuan Pasal 32 ini dapat diterapkan terhadap pertikaian RI dan Belanda. Walaupun begitu penerapan pasal tersebut tidak berjalan lancar karena mendapat tentangan dari wakil Belanda di DK, van Kleffens.

Yang dipermasalahkan oleh van Kleffens adalah status RI. Intinya menurut wakil Belanda di DK itu, RI bukanlah negara. Menurutnya,²² Indonesia meliputi seluruh kepulauan dari Sumatera di sisi barat sampai New Guinea di sebelah timur, yang di dalamnya tidak hanya RI yang terdiri dari Jawa dan Sumatera, dan menurut rencana tidak akan lebih dari itu, akan tetapi termasuk juga negara-negara Indonesia Timur dan Borneo, yang menurut Perjanjian Linggarjati, ketiganya akan menjadi satu yaitu Negara Indonesia Serikat. Selanjutnya masih menurut van Kleffens, RI bukan negara yang berdaulat, tidak lebih dari NIT dan Borneo. RI tidak pernah menjadi negara berdaulat. Pemerintahan RI hanya *de facto*. Lebih lanjut, RI dibangun sebagai senjata politik Jepang di Saigon. Soekarno dipanggil di Markas Besar Jepang sesaat sebelum Jepang menyerah dan diperintahkan membentuk badan politik yang disebut RI.

Namun demikian, di antara negara-negara yang ikut bersidang di DK banyak yang mengeluarkan pandangan yang menguntungkan RI. Negara-negara

²² Mohammad Roem, "Debat Tentang Status Republik Indonesia di Dewan Keamanan: Arti Penting Pengakuan Anggota-Anggota Liga Arab", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, *op. cit.*, hal. 62-63.

itu misalnya India, Syria, dan Australia. Wakil Syria di DK, Faris El Khouri menyatakan antara lain bahwa yang dibahas di DK bukan batas wilayah negara RI. DK dapat mendengarkan wakil yang datang atas nama RI, yang wilayahnya ditetapkan dalam persetujuan yang ditandatangani 25 Maret 1947. Karena itu DK hendaknya memperlakukan RI sebagai negara yang merdeka dan harus memplunyai hak melakukan kebebasannya.

Wakil Australia di DK, Kolonel Hudgson, menyatakan tiga hal penting mengenai RI. *Pertama*, Rencana Persetujuan Belanda-RI yang asli tanggal 15 November 1946 dirundingkan dan diparaf oleh wakil-wakil dari kedua pemerintah, Belanda dan RI. *Kedua*, Pemerintah RI sudah diakui oleh Pemerintah Belanda, sebagai pemerintah yang berkuasa *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatera menurut Pasal 1 Perjanjian Linggajati. *Ketiga*, RI sudah mendapat pengakuan *de facto* dari beberapa pemerintah, termasuk Inggris, AS, dan India, anggota-anggota Liga Arab dan Australia. Bahkan Mesir dan Syria sudah memberikan pengakuan *de jure* dengan menyelenggarakan Persetujuan Persahabatan di antara mereka.

Akhirnya hasil pemungutan suara di DK PBB adalah 8 melawan 3. Yang menyetujui RI diundang dalam sidang DK adalah Australia, Brasil, Cina, Columbia, Polandia, Syria, Soviet Uni, dan AS. Yang menolak adalah Belgia, Perancis, dan Belanda. Sementara itu Inggris bersikap abstain.

Dari paparan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengakuan negara-negara di Timur Tengah mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan dalam sidang-sidang di DK. Hal itu dapat terjadi berkat peran Mohammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat perannya tersebut posisi RI semakin *established* dalam masyarakat internasional.

PENUTUP

Mohammad Abdul Mun'im sebagai utusan khusus Liga Arab untuk Pemerintah RI, telah berperan mendorong Presiden Soekarno untuk membentuk delegasi RI untuk Liga Arab dan negara-negara anggotanya. Pengiriman delegasi RI itu berperan dalam mempercepat proses pengakuan negara-negara di Timur Tengah untuk mengakui RI.

Sebagai seorang konsul dari Mesir yang berkarya di India, Mohammad Abdul Mun'im memainkan peran diplomatik berdasarkan penugasan dari Liga Arab. Peran diplomatiknya ini berimplikasi langsung kepada kepercayaan diri Pemerintah RI dengan mengirim delegasi diplomatik yang pertama ke luar negeri.

Peran diplomatik Mohammad Abdul Mun'im secara tidak langsung berimplikasi pada kelancaran proses pengakuan Mesir, Syria, Libanon, Arab Saudi, dan Irak terhadap RI. Pengakuan negara-negara Timur Tengah ini terhadap RI membantu delegasi RI di DK PBB tatkala di antara negara-negara tersebut, dalam hal ini Syria menjadi anggota tidak tetap DK PBB yang pada tahun 1947 hingga 1949 membicarakan sengketa antara RI dan Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, A.R., 1978, "Catatan dan Kenangan", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta.
- Hassan, M. Zein, 1980. *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (Perjuangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hassan, Muhammad Zein, 1978, "Hubungan Indonesia-Mesir dan Negara-Negara Liga Arab", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta.
- Rasyidi, H.M., 1978, "Negara-Negara Arab Adalah Yang Pertama Mengakui Kemerdekaan Bangsa Indonesia", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta.
- Roem, Mohammad, 1978, "Debat Tentang Status Republik Indonesia di Dewan Keamanan: Arti Penting Pengakuan Anggota-Anggota Liga Arab", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta.
- Sastroamidjojo, Ali, 1978, "Tentang Pesawat Terbang Khusus Utusan Mesir", dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, Jakarta.
- Suraputra, D. Sidik, 1991, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia.